

# PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN BANJARMASIN *SMART CITY* DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN

Prawiro Setio Hadi

NPP. 30.1022

*Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan*  
*Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*  
Email: prawirosh.psh14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom, M.Si

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** *Technological developments have entered every layer of human life. Therefore, the government is starting to think about how to improve public services by utilizing digital information system technology combined with public services, one example of which is smart governance. From this background, in this study there are two problem formulations, namely 1. How is smart governance implemented by the Banjarmasin City Information Communication and Statistics Service. 2. What are the obstacles in implementing smart governance towards Banjarmasin Smartcity.*

**Objective:** *The aim of this research is to find out the efforts to implement smart governance by the Office of Communication, Informatics and Statistics of the City of Banjarmasin and to analyze the obstacles that hinder the implementation of smart governance. In this study, researchers used smart governance indicators according to Giffinger (2007) including participatory decision making, transparency of governance, public and social services, and political strategies and perspectives.*

**Methods:** *This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques in this study are by interview, observation, and documentation.* **Results/Findings:** *the findings obtained by researchers are the very good preparation of the Banjarmasin City government, the implementation of socialization that has not been evenly distributed, and the ability of the community to access information technology optimally.* **Conclusion:** *From the results of this study it can be concluded that the Banjarmasin City government has prepared very well for the implementation of smart governance, this is evidenced by the Mayor Regulation number 40 of 2019 concerning the smart city master plan and the road map for the Banjarmasin smart city master plan 2022-2206. However, in its implementation there are several obstacles such as uneven socialization regarding applications, people who are clueless (technology illiterate), and elements of illegal KKN practices (Corruption, Collusion, and Nepotism). Suggestions from researchers are to maintain service applications, increase socialization of service applications, increase digital literacy of the people of Banjarmasin City, and conduct research related to other pillars of smart city.*

**Keywords:** *Master plan, Smart City, Smart Governance, Technology*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Perkembangan teknologi telah masuk dalam setiap lapisan kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah mulai memikirkan cara meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi digital yang dipadukan dengan pelayanan publik yang mana salah satu contohnya ialah *smart governance*. Dari latar belakang tersebut, pada

penelitian ini terdapat dua rumusan masalah , yaitu 1. Bagaimana penerapan *smart governance* yang dilakukan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin. 2. Apa saja kendala dalam penerapan *smart governance* menuju Banjarmasin *Smartcity*. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini ialah mengetahui upaya penerapan *smart governance* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin dan menganalisis kendala yang menghambat dalam penerapan *smart governance*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator *smart governance* menurut Giffinger (2007) meliputi pengambilan keputusan yang partisipatif, transparansi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sosial, dan strategi dan perspektif politik. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** temuan yang didapatkan peneliti yaitu persiapan pemerintah Kota Banjarmasin yang sangat baik, pada pelaksanaan sosialisasi yang belum merata, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi dengan maksimal. **Kesimpulan :** Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah mempersiapkan penerapan *smart governance* dengan sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota nomor 40 tahun 2019 tentang *masterplan smart city* dan *road map masterplan smart city* Banjarmasin 2022-2206. Namun, pada penerapannya terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi mengenai aplikasi yang belum merata, masyarakat yang gaptek (gagap teknologi), dan oknum praktik ilegal KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Saran dari peneliti ialah maintenance aplikasi pelayanan, meningkatkan sosialisasi aplikasi pelayanan, meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Banjarmasin, dan melakukan penelitian terkait pilar lain dari *smart city*.

**Kata kunci:** *Masterplan, Smart City, Smart Governance, Teknologi*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi yang terjadi saat ini makin pesat ke arah serba digital. Begitu pentingnya peran teknologi inilah yang mulai membawa peradaban memasuki ke era digital. Dikutip dari Sari & Sanjaya (2019:357) “Perubahan menuju *smartcity* harus diiringi dengan peran pemerintah yang dapat merangkul ke instansi serta media lain yang terkait”. Melalui terobosan baru tersebut, maka hadirilah inovasi baru yang kita kenal dengan *smartcity*. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 49 kota yang meraih penghargaan *smartcity* dari kementerian komunikasi dan informasi pada tahun 2021. Untuk mewujudkan kota di Provinsi Kalimantan Selatan menuju era *smartcity*, Konsep *smartcity* atau kota pintar telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu dimana kemajuan teknologi menjadi fondasinya.

Salah satu program yang menjadi fokus utama penerapan *smart city* di Kota Banjarmasin ialah *smart governance*. Penerapan *smart governance* di Kota Banjarmasin berfokus pada salah satu tujuan yaitu nyaman baurusan yang menjadi tujuan Kota Banjarmasin di masa yang akan datang. Nyaman baurusan (bahasa banjar) disini diartikan sebagai kemudahan dalam pelaksanaan kepengurusan dibidang birokrasi pelayanan publik yang memerlukan tata kelola dan tata pamong pemerintah Kota Banjarmasin yang efektif, efisien dan komunikatif. Hal tersebut sudah terumuskan secara mendetail oleh dewan smart city Kota Banjarmasin dengan dibuatnya *masterplan smart city* Kota Banjarmasin tahun 2022-2026. *Masterplan smart city* ini terbagi menjadi 3 buku terpisah yang mana setiap buku menjelaskan tentang analisis dan strategi pemerintah Kota Banjarmasin dalam menerapkan program *smart city* sehingga dapat mewujudkan Banjarmasin kota sungai sebagai *D River smart city* yang mengedepankan kearifan lokal.

Dari Segi pelayanan, Kota Banjarmasin telah banyak melakukan inovasi *smart governance* dalam hal pelayanan publik. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya aplikasi-aplikasi pelayanan yang dibuat oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satu contohnya ialah aplikasi Banjarmasin Pintar. Banjarmasin Pintar adalah sebuah aplikasi digital yang menampung semua aplikasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Kota Banjarmasin. Sekaligus *SSO (Single Sign On)* dimana masyarakat dapat masuk ke semua aplikasi pelayanan publik dengan hanya satu kali pendaftaran atau hanya dengan satu akun. Sampai saat ini pengguna aplikasi telah mencapai kurang lebih seribu download dengan rating 3+. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang sebanyak 667 ribu jiwa, kuantitas penggunaan aplikasi tersebut masih jauh dari kata maksimal.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat beberapa masalah yang menghambat penerapan *smart governance* di Kota Banjarmasin. Kemampuan masyarakat umur >30 masih belum dapat menggunakan *smart phone* dan internet secara maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang mana mereka masih bisa menggunakan smart phone dan internet hanya untuk mengakses media sosial seperti instagram dan whatsapp.

Kurang meratanya sosialisasi tentang penerapan smart governance yang membuat kurang maksimalnya penggunaan aplikasi pelayanan publik seperti Banjarmasin Pintar. Disamping peluncuran aplikasi baru berumur 1 tahun, pemerintah masih dalam proses pemerataan penerapan aplikasi-pelayanan yang ada di dalam aplikasi Banjarmasin Pintar. Beberapa aplikasi yang terdapat di dalam aplikasi Banjarmasin Pintar masih error sehingga tidak dapat digunakan seperti sisintal (sistem informasi manajemen data dan kesejahteraan sosial). Padahal sosialisasi merupakan faktor utama maksimalnya penerapan hal baru seperti aplikasi pelayanan publik.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Annisah yang berjudul Usulan Perencanaan Smart City : Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Annisah, 2017) Penelitian ini telah menyusun usulan perencanaan *smart governance* sebagai salah satu dimensi yang mendukung *Smart City*. Dalam perencanaan *smart governance* digunakan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan *Smart City*. Dari hasil pemantauan *activity* pada COBIT 5 didapatkan kesimpulan bahwa dalam usulan rencana *smart governance* pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menitikberatkan pada ketersediaan infrastruktur dan juga pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian Eniyati menemukan bahwa tingkat kesiapan Kota Pekalongan dalam menerapkan Smart City dalam perspektif Smart Governance adalah 1,5 atau dalam nilai linguistik fuzzy adalah Sedang (Eniyati, 2017). Penelitian dari Waryono menemukan bahwa kepemimpinan transformasional yang kemudian dikenal dengan *smart integrated leadership* menjadi salah satu solusi guna mewujudkan konsep *smart city* di era society 5.0. Hal ini dikarenakan di era society 5.0 yang lebih mengedepankan manusia sebagai sumber atau pusat inovasi (*human centered*) dengan tetap berbasis teknologi sehingga dengan model kepemimpinan ini mampu membawa perubahan menuju era society 5.0 tersebut (Waryono, 2022). Penelitian dari Aindita mengenai penerapan konsep tata kelola *smart city* dalam pemerintahan Kota Semarang menemukan bahwa penerapan *smart city* sangat membantu dalam menghadapi pengembangan globalisasi namun terdapat beberapa hambatan seperti terbatasnya sumberdaya manusia pelaksana *smart city*, rendahnya investor, infrastruktur yang belum memadai, permasalahan kecepatan internet, dan kurangnya koordinasi antar

lembaga pemerintah pemegang jabatan (Aindita & Setiawan, 2022). Penelitian mengenai kesiapan masyarakat Kota Kupang dalam menerapkan *smart city* oleh Gella menemukan bahwa masyarakat Kota Kupang telah siap untuk menerapkan program *smart city* karena masyarakat sendiri telah mengenal teknologi informasi dan dapat membedakan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi seperti media sosial (Gella & Dwiatmadja, 2022)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana fokus utama penelitian ini mengetahui penerapan *smart governance* yang ada di Kota Banjarmasin dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan *smart governance* metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang mana sumber data berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedang teknik analisis data untuk dapat menarik kesimpulan menggunakan teknik analisis data kualitatif miles (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data yang mana berbeda dengan penelitian annisah, eniyati, waryono, aindita, dan gella.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penerapan *smart governance* yang telah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dan menganalisis apa saja faktor yang menghambat penerapan *smart governance* di Kota Banjarmasin.

## **II. METODE**

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan peneliti dapat mengambil data riil yang tersedia di lapangan sebagai acuan yang kemudian dideskripsikan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam (Sugiyono, 2018) dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu menggunakan indikator *smart governance* dari (Giffinger, 2007).

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara yang mana informan yang disaring menggunakan teknik *non probability sampling*, penggunaan teknik ini bertujuan untuk mewakili tujuan dari penelitian sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Informan terbagi menjadi 3 jenis yaitu informan kunci adalah informan yang mengetahui informasi atau gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti yaitu kepala dinas Diskominfo Kota Banjarmasin, informan utama atau orang yang mengetahui informasi secara teknis dan detail tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti kepala seksi infrastruktur dan teknologi informasi dan staf Diskominfo, dan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai pelengkap data analisis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penerapan *smart governance* pada Kota Banjarmasin menggunakan teori indikator *smart governance* oleh (Giffinger, 2007) yang menjelaskan bahwa *smart governance* itu memiliki beberapa indikator yaitu Pengambilan Keputusan yang Partisipatif (*Participation in decision making*), Transparansi Tata Kelola Pemerintahan (*Transparent governance*), Pelayanan publik dan sosial (*Public and social service*), dan Strategi dan Perspektif Politik (*Strategic political & perspective*) yang mana akan dibahas di subbab berikut :

### **3.1. Pengambilan Keputusan yang Partisipatif**

Dari ke 3 (tiga) indikator yang terdapat dalam dimensi pengambilan keputusan yang partisipatif. Diskominfo Kota Banjarmasin telah menyediakan forum yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat Kota Banjarmasin yaitu bamara (bapandapat manyambung silaturahmi) dan SP4N

LAPOR Kota Banjarmasin. Diskominfo juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat Kota Banjarmasin dalam mengakses layanan tersebut baik itu dengan online ataupun offline. Namun kemampuan masyarakat Kota Banjarmasin dalam mengakses teknologi informasi khususnya forum online yang menjadi penghambat penerapan layanan aspirasi tersebut. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan pelaksanaan smart governance masih terbilang baru, hal ini telah dikonfirmasi oleh Bapak Abdi selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik yang mengatakan bahwa penerapan aplikasi khususnya Banjarmasin Pintar baru berjalan sekitar 1 tahun dan tidak bisa dipungkiri bahwa pada proses penerapan tersebut masih diperlukan analisis berkala untuk setiap permasalahannya

### **3.2. Transparansi Tata Kelola Pemerintahan**

Diskominfo Kota Banjarmasin merupakan pusat dari penyebaran informasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Buletin Cinta yang memuat setiap informasi penting yang terjadi di Kota Banjarmasin menjadi sebuah majalah informatif. Di samping itu masyarakat dimudahkan dalam menerima pelayanan publik dan penyerapan informasi karena saat ini Kota Banjarmasin telah menerapkan program smart city yang mana setiap informasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan menjadi hak publik akan diberikan. Masyarakat juga dapat menyalurkan aspirasinya melalui forum-forum aduan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin seperti SP4N LAPOR dan bamara.

### **3.3. Pelayanan publik dan sosial**

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyiapkan diri untuk implementasi program smart city dengan cukup baik. Hal ini tentunya dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota nomor 40 tahun 2019 tentang masterplan smart city. Setiap pelayanan publik telah direncanakan dalam bentuk digital sampai tahun 2026 dan dimulai dengan peluncuran aplikasi Banjarmasin Pintar pada tahun 2022. Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan tentang penerapan smart governance menjelaskan bahwa masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan publik berbasis digital, salah satunya ialah pelayanan penampung aspirasi masyarakat seperti SP4N LAPOR. Para staf juga dianggap cukup tanggap dalam melayani masyarakat dan aplikasi yang diimplementasikan untuk mempermudah pelayanan juga dapat diandalkan. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai informasi pribadinya, karena pemerintah menjamin kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu pemerintah Kota Banjarmasin juga selalu memikirkan solusi terbaik akan permasalahan yang terjadi pada masyarakat demi memaksimalkan pelayanan publik berbasis digital.

### **3.4. Strategi dan Perspektif Politik**

Secara keseluruhan kebijakan smart city yang diterapkan di Kota Banjarmasin telah dipersiapkan dengan cukup matang. Hal tersebut terbukti dengan adanya dasar legalistik yaitu perwali nomor 40 tahun 2019 tentang masterplan smart city dengan begitu pemerintah Kota Banjarmasin telah serius dalam menanggapi penerapan smart city. Juga dengan adanya penyusunan buku masterplan smart city yang berisikan strategi inovasi smart city tahun 2022-2026 berdasar pada RPJMD dan RPJP Kota Banjarmasin. Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo menjelaskan bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya pada outcome tahun 2021, nilai evaluasi smart city Kota Banjarmasin bernilai 2,72 dan pada tahun 2022 naik menjadi 3,06. Terdapat beberapa kebijakan yang merupakan adopsi dari kebijakan daerah lain yang sekiranya menjadi solusi atas permasalahan kebijakan yang diterapkan. Pada penerapannya terdapat beberapa masalah, seperti implementasi yang terbilang baru sehingga penggunaan aplikasi masih belum maksimal, masih adanya oknum dari masyarakat dan pemerintah yang melaksanakan praktik ilegal seperti KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penerapan smart governance sebagai bentuk partisipasi dalam perkembangan teknologi informasi yang memudahkan manusia khususnya dalam pelayanan publik banyak memberikan dampak positif bagi pemerintah Kota Banjarmasin maupun masyarakat sebagai objek pelaksana kebijakan. Peneliti menemukan temuan penting ketika melakukan sosialisasi mengenai komponen smart governance yakni masyarakat begitu antusias menerima materi pelayanan khususnya dalam pelayanan peraduan SP4N LAPOR Kota Banjarmasin, mereka menilai dengan adanya forum aduan ini masyarakat akan lebih mudah dalam mengadakan laporan maupun hanya sekedar memberikan saran untuk perkembangan layanan agar menjadi lebih baik. Sama pada penelitian yang dilakukan oleh (Anisah, 2017) Kota Banjarmasin telah mempersiapkan diri untuk memaksimalkan program smart city yaitu dengan menyusun strategi pelaksanaan *smart city* yaitu master plan smart city Kota Banjarmasin. Pemimpin yang mengikuti perkembangan zaman menentukan bagaimana kondisi wilayahnya ketika zaman mulai bergerak secara dinamis. Hal ini yang telah ditemukan pada penelitian Waryono bahwa pada era society 5.0 manusia menjadi pusat informasi, hal ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan ini mampu membawa perubahan menuju era society 5.0 tersebut (Waryono, 2022). Dalam setiap penerapan program akan selalu ada hambatan yang menjadi faktor penghambat penerapannya. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena penerapan smart city bukan merupakan perkara yang mudah, diperlukan berbagai macam persiapan dan percobaan setiap program ke masyarakat hingga akhirnya baik itu aplikasi dan masyarakat sudah menyatu sehingga program tersebut dapat terselenggarakan dengan maksimal (Aindita & Setiawan, 2022).

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa salah satu penghambat dari penerapan smart governance di Kota Banjarmasin ialah belum meratanya sosialisasi mengenai smart governance sehingga masyarakat belum tahu dan belum mengerti cara mengaksesnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil analisis yang telah peneliti simpulkan tentang penerapan smart governance bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin telah mempersiapkan dan menerapkan smart governance dengan cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya forum aspirasi yang diagendakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sebagai tempat masyarakat menyampaikan usul dan saran, media-media informasi elektronik yang mudah diakses semua umur sebagai bentuk transparansi pelayanan oleh pemerintah, pelayanan publik yang dapat diandalkan, dan penetapan strategi dan kebijakan politik yang matang baik itu dari penyusunan kebijakan sampai evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala. Disamping cukup baiknya persiapan dan penerapan smart governance di Kota Banjarmasin masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan smart governance seperti halnya kemampuan masyarakat umur 30 tahun keatas yang masih kurang mampu memaksimalkan penggunaan smart phone dan internet, error pada aplikasi pelayanan Banjarmasin pintar, dan belum meratanya sosialisasi tentang pelayanan publik berbasis digital (*smart governance*). **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pilar smart city lain seperti smart branding, smart living, smart environment, smart economy, dan smart society.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh staf Diskominfo Kota Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aindita, elfrida tri farah, & Setiawan, I. (2022). *PENERAPAN KONSEP SMART CITY*. 14(1), 97–116.
- Annisah. (2017). Usulan Perencanaan Smart City : Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko\*. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>
- Eniyati, S., Santi, R. C. N., Retnowati, R., Mulyani, S., & Martha, K. (2017). Perhitungan Tingkat Kesiapan Implementasi Smart City Dalam Perspektif Smart Governance Dengan Metode Fis Mamdani. *Dinamik*, 22(1), 39–48. <https://doi.org/10.35315/dinamik.v22i1.7104>
- Gella, D. G., & Dwiatmadja, C. (2022). Analisis Kesiapan Masyarakat Terhadap Implementasi Program Smart City Kota Kupang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 327–340. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1333>
- Giffinger, R. (2007). Smart cities Ranking of European medium-sized cities. *Research Institute for Housing, Urban and Mobility Services*, 16(October), 1–24. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026427519800050X>
- Sari, N., & Sanjaya, A. (2019). KEPALA DAERAH DAN KONSERVASI LINGKUNGAN LAHAN BASAH: STUDI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PINTAR Local Leader and Wetland Conservation: Study of Environment Policy in Smart Banjarmasin City. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 4(April), 357–364. <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/download/213/214>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). alfabeta, cv.
- Waryono, W. (2022). *PENGEMBANGAN KONSEP SMART CITY MENUJU ERA SOCIETY 5.0 : SEBUAH KAJIAN LITERATUR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AS A SOLUTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE SMART CITY CONCEPT IN THE SOCIETY ERA : A LITERATURE REVIEW* Pendahuluan. 1(1), 33–44.